

Potensi Penerapan Blue Economy Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta.pdf

Potensi Penerapan Blue Economy Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta

The Potential Application Of Blue Economy In Supporting Sustainable Development In The Coastal Areas Of Yogyakarta Special Region

Maria Nooza Airawati¹, Ibnu Fauzi¹, Alan Putranto²

¹Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia
Jal. Hidrodinamika, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Indonesia

²Department of Civil Engineering, National Central University, Taiwan, Republic of China
Department of Civil Engineering, National Central University, Taoyuan 32011, Taiwan
e-mail: mari016@brin.go.id

ABSTRAK

Kondisi wilayah pesisir yang kaya potensi ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir, hal tersebut juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Salah satu konsep yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan di wilayah pesisir adalah Blue Economy (BE), yaitu pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas potensi BE di wilayah pesisir, namun belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji potensi penerapan BE di wilayah pesisir, namun belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji potensi penerapan BE dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan lokasi penelitian wilayah Pesisir DIY. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerapan BE pesisir DIY dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan dan strategi pengembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk menerapkan konsep BE di wilayah pesisir DIY, terutama pada sektor wisata bahari yang selaras dengan visi misi Gubernur periode 2022 – 2027. Dalam penerapan BE perlu adanya sinergi antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, diperlukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

Kata kunci: blue economy; kemiskinan; pembangunan berkelanjutan; wilayah pesisir; yogyakarta

ABSTRACT

The condition of potentially rich coastal area did not sufficiently balance the welfare gains of people in coastal areas, and this also happens in the Special Region of Yogyakarta (DIY). One concept that can be applied to overcome problems in coastal areas is the Blue Economy (BE), which is the sustainable use of marine resources to improve community welfare. Several previous studies have discussed the potential of the Blue Economy in coastal areas. However, research has yet to specifically examine the potential application of BE in supporting sustainable development with DIY Coastal area research sites. This study aims to determine potential application of BE on coastal area of DIY to support sustainable development and its development strategy. The methodology of this research is qualitative, using a case study approach. This research shows great potential to apply the BE concept in DIY coastal areas, especially in the marine tourism sector, aligning with the Governor's vision and mission for 2022 – 2027. In implementing BE, there must be synergy between all stakeholders, including the government, society, and the private sector. In addition, efforts are also needed to increase the capacity and knowledge of coastal communities in sustainably managing marine resources.

Keywords: blue economy; poverty; sustainable development; coastal areas; yogyakarta

3 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai mencapai 99.093 km (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). Sebagian besar wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan laut dimana berbagai macam potensi baik sumber daya alam dan jasa lingkungan terdapat di wilayah pesisir. Kondisi wilayah pesisir yang kaya potensi ini ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Sepanjang tahun 2021 kemiskinan ekstrim terjadi di 35 kabupaten prioritas di 7 provinsi dengan mayoritas 69% kabupaten berada di wilayah pesisir. Di tahun 2022 pemerintah memperluas jangkauan penanggulangan kemiskinan ekstrim di 212 kabupaten kota di 25 provinsi dengan 69% kabupaten berada di wilayah pesisir (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2021). Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4% atau berjumlah 10,86 juta jiwa dari tingkat angka kemiskinan nasional yang masih sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah pesisir relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya dan memiliki persoalan yang lebih kompleks (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2021). Secara umum kemiskinan dapat disebabkan oleh dua kondisi, yaitu kemiskinan alamiah dan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2012).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang berada di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, dengan total panjang garis pantai 126 kilometer (Sidik, 2015). Kondisi masyarakat wilayah pesisir DIY masih tergolong marginal dan belum sepenuhnya sejahtera. Beberapa faktor penyebab antara lain rendahnya kualitas sumberdaya manusia, sehingga mayoritas masyarakat pesisir masih sangat tradisional dan konvensional dalam memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir (Kedaulatan Rakyat, 2017). Kemiskinan menjadi suatu masalah yang sangat kompleks dimana untuk menanggulangnya harus menentukan solusi dan strategi yang tepat dan berkesinambungan (Ikejiaku, 2009).

Selain tingkat kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah, wisata bahari di wilayah pesisir DIY juga menghadapi berbagai permasalahan lingkungan akibat aktivitas wisata. Wisata bahari adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di wilayah pesisir dengan memanfaatkan potensi yang ada di bentang laut maupun darat (Masjihoer, 2019). Permasalahan yang timbul di wisata

bahari DIY diantaranya adalah abrasi yang terjadi di Pantai Kuwaru, Kab.Bantul (Mutaqin, 2017); abrasi desa pesisir di Kab. Kulonprogo (Arman, 2017); pencemaran sampah di gisik Pantai Baron, Kab. Gunungkidul akibat aktivitas wisatawan (Kusumastuti & Pamungkas, 2018) dan kondisi terumbu karang mulai rusak di pantai Indrayanti, Krakal, Sundak Kab. Gunungkidul akibat aktivitas wisata massal (Nugraha & Santoso, 2018). Padahal wisata bahari ini merupakan salah satu sektor unggulan di wilayah pesisir.

Secara umum, pariwisata menyumbang kontribusi terbesar kelima di Pendapatan Regional Bruto Daerah (PDRB) Provinsi DIY setelah sektor industri; pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan; informasi dan komunikasi; konstruksi (Happold, 2022; Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021). Wilayah pesisir DIY dikenal memiliki pemandangan yang indah dan menjadi destinasi wisata yang populer. Tercatat sebanyak 45 destinasi wisata bahari yang ada di wilayah pesisir DIY (Bappeda DIY, 2018). dan termasuk ke dalam 10 destinasi wisata dengan jumlah pengunjung domestik dan mancanegara terbanyak di DIY (Buro Happold, 2022).

Pengelolaan wilayah pesisir seyogyanya dilakukan secara keberlanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pengelolaan wilayah pesisir DIY yang optimal akan meningkatkan kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari masing-masing kabupaten (Purwantara et al., 2014). Pengelolaan yang baik ini juga harus didukung dengan kesehatan lingkungan laut yang memadai guna memberikan manfaat secara berkesinambungan, baik untuk saat ini ataupun masa mendatang.

Pemerintah DIY memasukkan konsep pembangunan berkelanjutan menjadi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022 - 2027. Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, *Blue Economy* (BE) atau ekonomi biru diartikan sebagai pengelolaan aset kelautan, mobilisasi intensif dan investasi, perluasan kawasan lindung laut, pengumpulan data, pengembangan pariwisata, dan bangkit kembali dari pandemi COVID-19 (Detik Jateng, 2022). Mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang kelautan, yang dimaksud dengan ekonomi biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan Pengelolaan Kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir serta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber data, meminimalkan limbah dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*). Di sisi lain, rencana Gubernur Provinsi DIY yang menjadikan Samudera Hindia sebagai tema dan payung berpikir dalam perumusan arah pembangunan DIY, membuat kawasan pesisir selatan menjadi kawasan prioritas untuk dikembangkan (Irawati & Rifan, 2020).

12

31

36



Sumber: Hasil Analisis. 2023

29

Data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap pakar dan pihak terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam rangka memperoleh gambaran kebijakan pemerintah DIY terhadap BE, Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memperoleh data serta kondisi aktual pemanfaatan daerah pesisir di sektor perikanan serta Dinas Pariwisata sebagai pelaksana kebijakan di sektor pariwisata bahari, ekonomi kreatif dan sektor pendukung pariwisata lainnya. Untuk data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai referensi literatur yang terkait dengan BE dan kondisi eksisting kawasan pesisir DIY.

Data dianalisis dengan menggunakan matrik kajian kondisi eksisting kawasan pesisir DIY terhadap implementasi BE beserta kebijakan terkait. Indikator penerapan BE diperoleh dari kombinasi indikator *Ocean Health Index* (OHI) (Anh et al., 2022; Halpern, 2020) dan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) (Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, 2020). Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk melihat potensi penerapan BE di wilayah pesisir DIY dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan dan merumuskan strategi pengembangannya.

GAMBARAN UMUM WILAYAH PESISIR DIY

12

Provinsi DIY terletak di tengah sisi selatan Pulau Jawa. Propinsi ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Secara geografis Provinsi DIY terletak diantara 7°33'-8°15' Lintang Selatan dan 110°5' – 110°50' Bujur Timur. Provinsi DIY terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota yaitu: Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Secara garis besar visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2022 – 2027 merupakan kelanjutan visi pada periode sebelumnya. Tiga prioritas utama dalam visi dan misi tersebut yaitu kawasan selatan, reformasi kelurahan dan teknologi informasi. Kawasan selatan dalam hal ini merupakan wilayah DIY yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, menjadi perhatian khusus pemerintah.

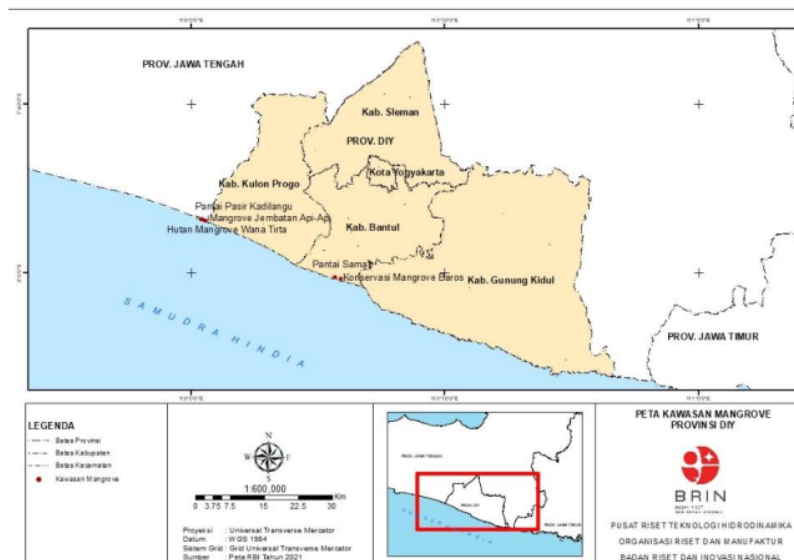
Wilayah pesisir DIY memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Potensi-potensi yang ada diantaranya adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertanian dan pariwisata. Kondisi eksisting perikanan tangkap yang berkembang di wilayah pesisir DIY belum optimal. Baru sebagian kecil saja yang sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jenis komoditas ikan yang dominan diantaranya tuna, tongkol, cakalang dan layur. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terletak di Pantai Sadeng dan Pantai Geseng (Gambar 2).



Gambar 2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wilayah Pesisir DIY

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Wilayah pesisir DIY juga memiliki kawasan hutan mangrove yang tersebar di wilayah pesisir Kabupaten Kulonprogo dan Bantul. Kawasan hutan mangrove berfungsi sebagai habitat biota laut sekaligus untuk mencegah abrasi garis pantai. Letak kawasan hutan mangrove dapat dilihat pada Gambar 3.



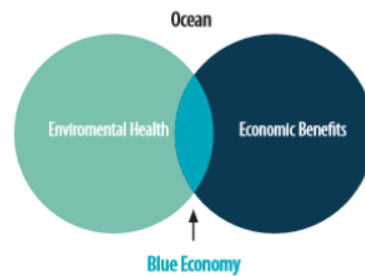
Gambar 3. Kawasan Hutan Mangrove WilayahPesisir DIY

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kondisi perekonomian wilayah pesisir DIY sebagian besar masih tertinggal. Berdasarkan data yang didapat dari RPJMD, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo (Bappeda DIY, 2018). Nilai PDRB tahun 2015 - 2019 ketiga kabupaten yang terletak di wilayah pesisir tersebut 46% lebih rendah jika dibanding Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Diperlukan pemanfaatan potensi yang optimal disana sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENERAPAN BLUE ECONOMY

Pembangunan wilayah pesisir DIY ke depan akan meningkat sehingga berpotensi menimbulkan tekanan pada lingkungan. Dorongan kebutuhan penerapan BE akan meningkat lebih cepat dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Agar didapatkan pemahaman komprehensif mengenai penerapan BE maka dibutuhkan suatu *tools* yang berisi indikator kesehatan laut. Pada dasarnya, konsep BE adalah lensa untuk melihat dan mengembangkan agenda kebijakan yang secara bersamaan meningkatkan kesehatan laut dan pertumbuhan ekonomi, dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusi sosial seperti pada ilustrasi gambar berikut



Gambar 4. Konsep *Blue Economy*

Sumber: (Patil et al., 2016)

Ocean Health Index (OHI) merupakan suatu *framework* untuk menilai kesehatan laut berdasarkan penyediaan manfaat dan layanan berkelanjutan yang diharapkan masyarakat dari laut yang sehat, seperti makanan, nilai budaya dan sosial, serta pekerjaan (Halpern, 2020). *Framework* ini kemudian diadaptasi di Indonesia menjadi pedoman Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi pada tahun 2020. Sektor yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: laut sebagai penyedia jasa pariwisata dan rekreasi; perlindungan pesisir; laut sebagai sumber mata pencaharian dan ekonomi; perairan yang bersih dan laut sebagai sumber produk alam. Pada Tabel 1 disajikan matriks penerapan BE di wilayah pesisir DIY serta kebijakan pendukungnya.

Tabel 1. Matrik Penerapan *Blue Economy* di Pesisir DIY dan Kebijakan Pendukung

No	Sektor	Variabel	Indikator	Kondisi Eksisting	Kebijakan
1	Laut sebagai Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi	Destinasi wisata bahari	Jumlah destinasi	45 destinasi	1. RPJMD DIY 2017 - 2022
					2. Renstra Dinas Pariwisata Yogyakarta 2016 - 2022
		Wisatawan Nusantara	Jumlah kunjungan (orang)	2021: 3.442.245 2020: 3.737.149 2019: 6.563.019	Perda 1 tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Provinsi DIY 2012 - 2025
		Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan (orang)	2021: 520 2020: 2.369 2019: 13.969	Perda 1 tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Provinsi DIY 2012 - 2025
		Kontribusi PDB pariwisata	% PDRB Nasional	2021: 9.131.091 2020: 8.489.706 2019: 9.383.603	SE Gubernur DIY Nomor 23/SE/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 kepada Bupati/Walikota se DIY, Kepala Instansi Vertikal, Kepala OPD Pemda DIY tentang Gerakan Berwisata Aman dan Sehat dalam Upaya Mendorong Percepatan Pemulihan Industri Pariwisata DIY
2	Perlindungan Pesisir	Nilai devisa pariwisata	USD Milyar/Tahun	secara Nasional 2018: 229,50 2019: 280	Peraturan Menteri Parekraf/Kepala Badan Parekraf No 11 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kemenparekraf Tahun 2020 - 2024
		Penyerapan Tenaga kerja Sektor pariwisata	Orang	tahun 2019: 9.123 tahun 2020: 7.433 tahun 2021: 6.392	Perda DIY No 4 Tahun 2020 tentang Kepramuwisataaan
		Lebar sempadan pantai	meter	100 meter dari garis pantai	Perda DIY No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 - 2030
		Luas Kawasan Konservasi Perairan/Taman Nasional Laut dan Cagar Alam Laut (KKPD, KKPN, Taman Nasional) Kondisi Terumbu Karang yang	Ha	di Kabupaten Bantul seluas 695,89 Ha	Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pantai Selatan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
			Ha	3,05 Ha 10% baik, 20% sedang dan 70% rusak	1. PermenLHK No 4 Tahun 2001

	Cukup, Baik, dan Sangat Baik				2. ⁷ Perda DIY No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 - 2030
	Rehabilitasi Mangrove	Ha	Luas tutupan hutan Mangrove 2020: 5 Ha 2021: 198,81 Ha		Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014
	Rehabilitasi Padang Lamun, Terumbu Karang, dan Vegetasi Pantai	Lokasi	Pantai di sepanjang Kabupaten Gunung Kidul		³ Perda DIY No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 - 2030
3	Laut sebagai Sumber Mata Pencarian dan Ekonomi	Nilai Ekspor Perikanan	Kilogram 2019: 19.430,19 2020: 32.554,01 2021: 12.106,27 2022: 23.144,12		Perda DIY No 16 Tahun 2011 tentang Rencana ³ zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 - 2030
	PDRB Perikanan	Kontribusi terhadap PDB Nasional (%)	PDRB subsektor perikanan DIY tahun 2018-2021 rata-rata berkontribusi sebesar 0,63% terhadap PDB nasional yaitu sebesar 345.870 (juta rupiah) pada tahun 2022		Perda DIY No 16 Tahun ⁷ 11 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 - 2030
	Persentase Kondisi Terumbu Karang yang Cukup, Baik, dan Sangat Baik	Kontribusi terhadap PDRB DIY (%)	10% baik, 20% sedang dan 70% rusak		Perda DIY No 16 Tahun ³⁰ 1 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 - 2030
	PDRB Maritim	Kontribusi terhadap PDB Nasional (%)	0,25 (dihitung dari sektor perikanan dan wisata bahari saja)		1. Perda DIY No 16 ³ tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 – 2030 2. Renstra Dinas Pariwisata Yogyakarta 2017 - 2022
4	Perairan yang bersih	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Sampel pantai: Pantai Baron, Pantai Depok, Pantai Glagah dan Pantai Kuwaru 1. Kualitas BOD: seluruh pantai berada dalam kisaran normal namun Pantai Kuwaru sudah berada dalam ambang batas tinggi		1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. ³³ Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut

		2. Kualitas TSS: Pantai Baron, Pantai Depok, Pantai Glagah dan Pantai Kuwaru mempunyai nilai TSS melebihi ambang batas normal 3. Kualitas coliform: seluruh pantai berada dalam kisaran normal 4. Kualitas DHL: tidak ada data 5. Kualitas salinitas: seluruh pantai berada dalam kisaran normal 6. Kandungan kadmium (Cd) : seluruh pantai berada dalam kisaran normal 7. Kandungan Kromium (Cr): seluruh pantai berada dalam kisaran normal 8. Kandungan timbal (Pb): seluruh pantai berada dalam kisaran normal 9. Kandungan nikel (Ni): seluruh pantai berada dalam kisaran normal 10. Kandungan seng (Zn): seluruh pantai berada dalam kisaran normal			PerDirjen PPKL KLHK Nomor: P.11/PPKL/SET/WAS.1/8/2018 tentang Kriteria Evaluasi Kinerja Pelabuhan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Jumlah Pelabuhan Laut yang Menerapkan Program <i>Green Port</i> dan Pengelolaan Sampah Plastik	Program Green Port dari Kemenko Marves	Pelabuhan yang sudah memiliki sertifikat ISO 14001: 0 Pelabuhan	
5	Laut sebagai Sumber Produk Alam	Produksi garam sebagai bahan baku	Kg/Tahun	2020: 7.238 2021: 13.750	Perda DIY No. 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pembudidaya Garam
		Produksi Rumput Laut	Kg/Tahun	2019: 474.799 2020: 140.667 2021: 2 73.366	Perda DIY No 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 – 2030

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan asing) dan kontribusi pariwisata kepada PDRB DIY mengalami penurunan hampir sebanyak 50% mulai tahun 2020 akibat pandemi.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan aktivitas wisata mengalami penurunan sehingga menyebabkan penyerapan tenaga kerja wisata pada tahun 2020 juga menurun 20% dibanding tahun 2019. Dampak pandemi ini masih berlanjut hingga tahun 2021, namun sejak PPKM dilonggarkan pada pertengahan tahun 2021, kondisi mulai membaik dan aktivitas wisata mulai mengalami peningkatan kembali. Pada tahun 2021, kontribusi PDB pariwisata meningkat 8% dibanding tahun 2020. Pelonggaran PPKM juga didukung dengan implementasi kebijakan Pemda DIY yang mengeluarkan SE Gubernur DIY Nomor 23/SE/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 tentang Gerakan Berwisata Aman dan Sehat dalam Upaya Mendorong Percepatan Pemulihan Industri Pariwisata DIY sehingga industri wisata di DIY bisa pulih kembali.

Kondisi lingkungan wilayah pesisir tentunya harus dilindungi agar pemanfaatannya bisa terjaga dan berlanjut. Pemda DIY menunjukkan komitmen perlindungan wilayah pesisir dengan menerapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DIY Tahun 2011 – 2030 yang tertuang dalam Perda DIY No. 16 Tahun 2011. Kondisi perairan laut di DIY masih cukup ideal yang dibuktikan dengan baku mutu air lautnya rerata masih dalam kisaran normal. Perairan yang bagus ini mendukung pertumbuhan makhluk hidup yang ada di dalamnya sehingga potensi perikanan tangkap juga bisa meningkat. Terdapat peningkatan nilai ekspor perikanan tangkap sebanyak 90% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY tahun 2022, potensi perikanan tangkap di wilayah pesisir DIY sebanyak 32.000 ton namun yang baru bisa ditangkap hanya 12,5% saja. Kondisi ini terjadi karena belum ada pelabuhan besar di DIY.

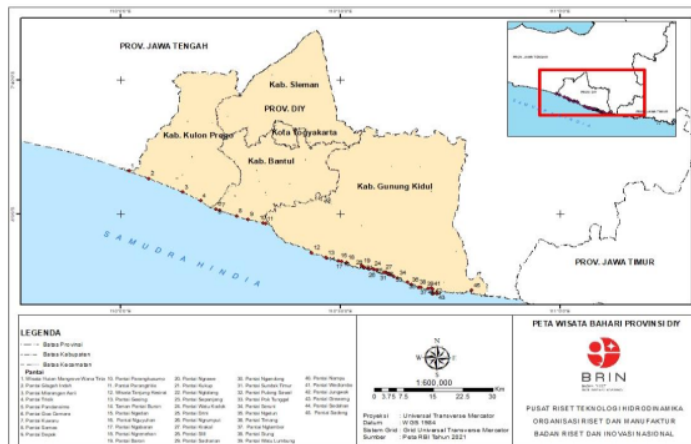
Komitmen Pemda DIY untuk melindungi pesisir juga terlihat dengan program dari Dinas Lingkungan Hidup yang menambah jumlah areal tutupan hutan mangrove yang terletak di Kabupaten Bantul dan Kab. Kulon Progo. Luas hutan mangrove tahun 2021 meningkat 4000% dibanding tahun 2020. Luas hutan mangrove tahun 2020 adalah 5 Ha sedangkan pada tahun 2021 menjadi 198,5 Ha. Penambahan lokasi hutan mangrove terdapat di sekitar kawasan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Kecamatan Temon dan Kecamatan Sanden. Penambahan areal tutupan hutan mangrove meningkat signifikan di area sekitar Bandara YIA dalam rangka mitigasi tsunami di pantai selatan. Selain untuk mitigasi bencana tsunami, mangrove di DIY juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan ekosistem, mencegah abrasi pantai dan mengurangi pencemaran (Hilmi et al., 2022; Nugraha et al., 2019). Status rehabilitasi terumbu karang menunjukkan hasil yang berbeda dengan hutan mangrove. Kondisi terumbu karang belum ada perbaikan sejak tahun 2020 hingga saat ini dimana kerusakannya mencapai 70% luas tutupan. Belum adanya kebijakan Pemda DIY yang mengakomodasi perlindungan terumbu karang secara khusus menyebabkan upaya rehabilitasi belum berjalan.

Secara umum, hasil dari Tabel 1 menunjukkan bahwa kondisi eksisting penerapan BE di pesisir DIY dan kebijakan pendukung sudah terlaksana namun belum optimal dan selaras. Sektor ekonomi dan pariwisata memegang peranan penting bagi wilayah pesisir DIY. Wilayah pesisir

DIY memiliki ciri unik seperti gumuk pasir aeolian, pantai karst, pantai pasir putih serta pantai pasir hitam. Pantai-pantai ini menjadi destinasi wisata yang populer bagi wisatawan domestik dan asing. Jumlah wisatawan yang berkunjung diprediksi akan terus bertambah seiring dengan meredanya pandemi Covid 19. Kebijakan dan peraturan yang disusun oleh Pemerintah DIY cukup lengkap dan hampir mencakup semua aspek seperti kepramuwisataan, rencana pengembangan pariwisata, pemulihan kondisi pariwisata pasca pandemi serta pengaturan tata ruang wilayah pesisir untuk mengakomodir kegiatan wisata.

POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Kontribusi sektor ekonomi di Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari Kontribusi PDRB kecamatan terhadap provinsi. Kontribusi PDRB kecamatan terhadap provinsi rata-rata per kecamatan di Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 0,74%. Total kontribusi Kontribusi PDRB Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap provinsi adalah 24,33% dari PDRB DIY (Bappeda DIY, 2018). Wisata di wilayah pesisir, atau dapat disebut dengan istilah wisata bahari merupakan tulang punggung aktivitas perekonomian di masyarakat. Sebanyak 45 destinasi wisata bahari ada di wilayah pesisir DIY (Bappeda DIY, 2018; Gambar 5).



Gambar 5. Destinasi Wisata Bahari Wilayah Pesisir DIY

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Wisata bahari di wilayah pesisir DIY termasuk ke dalam 10 destinasi pariwisata di DIY dengan jumlah pengunjung domestik dan mancanegara terbanyak. Sektor pariwisata menjadi 10 besar sektor yang menopang perekonomian DIY. Sektor kegiatan akomodasi dan jasa makanan yang erat kaitannya dengan kegiatan pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang tumbuh signifikan di Provinsi DIY. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 8,84% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Provinsi DIY (Happold, 2022). Pendapatan dari sektor wisata bahari menopang 5% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 Provinsi DIY.

Pengelolaan wilayah pesisir DIY hingga saat ini masih terus membutuhkan upaya perbaikan. Pengelolaan wisata bahari di Kabupaten Bantul masih berstatus kurang berlanjut dari segi aspek lingkungan, sosial dan transversal (Hasanah, 2022) Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir masih rendah. Hambatan yang ditemui yaitu tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan keterampilan, kurangnya kesempatan kerja karena tergantung musim (Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020). Masyarakat pesisir seharusnya memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahtraanya dengan cara memanfaatkan potensi wisata bahari. Usaha pengelolaan wilayah pesisir harus dilengkapi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk wisatawan, sehingga akan meningkatkan jumlah kunjungan sekaligus peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Sudarsono & Susantun, 2019).

Sejumlah upaya pemerintah untuk mendongkrak sektor wisata bahari telah dilakukan dengan peningkatan aksesibilitas menuju wilayah pesisir dan penyediaan infrastruktur strategis. Proyek Jaringan Jalan Lingkar Selatan (JJLS) di selatan DIY dan Bandara YIA merupakan upaya penyediaan infrastruktur strategis untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan mewujudkan wilayah selatan DIY sebagai halaman depan DIY (Bappeda DIY, 2018; Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012). Arah pengembangan rencana tata bangunan dan lingkungan pada wilayah pesisir tertuang dan menjadi prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DIY Tahun 2012 – 2025. Arah pengembangan sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di Pantai Congot – Glagah – Bugel dan sekitarnya; Pantai Parangtritis – Depok – Kuwaru dan sekitarnya; Pantai Baron – Sundak dan sekitarnya serta Pantai Siung – Wediombo dan sekitarnya.

Pariwisata merupakan sektor yang bersifat *multiplier effect*, dimana suatu kondisi pengembangan pariwisata dapat berpengaruh terhadap sektor – sektor lain yang mendukung sektor pariwisata. Pengembangan wisata bahari diyakini mempunyai *multiplier effect* yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendatangkan wisatawan asing. Tujuan utama pengembangan pariwisata berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah. Supaya pengelolaan wisata bahari sejalan dengan penerapan prinsip BE, perlu dirumuskan strategi pengoptimalannya. Strategi pengoptimalan penerapan BE dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Strategi Pengoptimalan Implementasi BE sektor Wisata Bahari

Potensi	Strategi Pengembangan
1. Garis pantai provinsi DIY sepanjang 113 km dan masih banyak pantai baru untuk dieksplor menjadi destinasi wisata bahari	1. Pengelolaan kepariwisataan sebagian telah mengimplementasikan prinsip keberlanjutan, hal ini bisa dijadikan sebagai percontohan untuk diterapkan di destinasi wisata lainnya
2. Pantai selatan DIY merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)	2. Pengelolaan wilayah pesisir diupayakan untuk menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya caranya dengan

3. Dukungan infrastruktur berupa Bandara YIA, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan proyek tol DIY - Jawa Tengah	penanaman vegetasi di pantai untuk menjaga ekosistem pantai serta mengurangi potensi abrasi
4. Pengembangan pariwisata antar regional jogja-solo-semarang (joglosemar) dan KSPN Borobudur	3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung sektor pariwisata melalui kelompok sadar wisata (pokdarwis), desa wisata dan UMKM
5. Atraksi wisata dan budaya di wilayah pesisir	4. Pemanfaatan potensi lokal (contoh: tanaman pandan laut, limbah kerang, rumput laut) melalui UMKM
	5. Pengoptimalan pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) dalam mendukung atraksi wisata
	6. Pengoptimalan pusat informasi wisata bahari terintegrasi di berbagai platform digital
	7. Peningkatan kualitas wisata untuk meningkatkan durasi kunjungan wisatawan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Wisata bahari adalah salah satu sektor penting di DIY. Pemerintah DIY terus mengusahakan perbaikan dan peningkatan wisata agar pendapatan daerah bisa meningkat. Sejumlah eksplorasi destinasi wisata baru terus dilakukan sembari menambah 4 unsur utama pariwisata yang terdiri dari atraksi, aksesibilitas, amenities dan ansilari. Atraksi yang terdapat di wilayah pesisir DIY meliputi atraksi wisata dan budaya diantaranya adalah *event* labuhan yang diadakan hampir di setiap pantai oleh warga lokal, jogja *air show* di Pantai Depok dan festival layang-layang di Pantai Parangkusumo. Aksesibilitas menuju wilayah pesisir selatan DIY hingga saat ini masih terus dibangun, diantaranya adalah penambahan JJLS, penambahan rute pesawat tujuan YIA dan pembangunan Jembatan Kretek 2 yang menjembatani pantai Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Pengembangan fasilitas kepariwisataan/amenitas dilakukan dengan menggandeng pihak swasta dan tidak lagi terpusat hanya di Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Sleman. Arah kebijakan pariwisata DIY saat ini adalah meningkatkan kualitas pariwisata DIY dengan slogan *quantity to quality tourism*. Kualitas wisata dapat dicapai dengan peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata sehingga diharapkan dapat meningkatkan durasi wisata pengunjung dan meningkatkan pendapatan.

PENUTUP

Sesuai dengan visi misi Gubernur periode 2022 – 2027, wilayah pesisir DIY menjadi kawasan prioritas yang akan dikembangkan. Pengembangan kawasan akan menyebabkan faktor ekonomi dan keberlanjutan pengelolaan akan saling berhimpitan. *Blue economy* merupakan jembatan kedua faktor tersebut agar keduanya bisa berjalan beriringan. Wisata bahari merupakan salah satu sektor dalam *Blue Economy* dan memegang peranan penting bagi perekonomian Provinsi DIY. Potensi wisata bahari DIY masih sangat mungkin berkembang seiring dengan penambahan destinasi wisata bahari baru, infrastruktur pendukung maupun pilihan jenis atraksi. Melalui penerapan konsep *Blue Economy*, potensi ekonomi wilayah pesisir dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi tekanan pada sumber daya alam yang terbatas.

Namun, untuk menerapkan konsep *Blue Economy* dengan efektif, perlu adanya sinergi antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, diperlukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan konsep *Blue Economy* dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh wilayah pesisir DIY dalam menjaga keberlangsungan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber baik dari Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan secara keseluruhan atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anh, K., Nguyen, T., & Jolly, C. M. (2022). *The Use of a Production Function to Evaluate Caribbean Ocean Health Conflicts and Economic Development : Policy Implications*. 808–826. <https://doi.org/10.1007/s00267-022-01696-7>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). *Analisis Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta*. 1(2), 1–166.
- Bappeda DIY. (2018). Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022. In *Biro Hukum Sekda DIY* (Vol. 1, Issue 69, pp. 5–24).
- Buro Happold. (2022). *Market Analysis and Demand Assessment for The Extension of Integrated Tourism Destination : Central Java and DIY Assessment Report*. https://p3tb.pu.go.id/uploads_file/20221012.1987.1. Central Java Assessment Report v6-ID.pdf
- Detik Jateng. (2022). *Sultan Jogja Akan Garap Blue Economy di Samudera Hindia, Seperti Apa_*.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2012). Dimensi Kemiskinan. *Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN DPR RI*, 47–56. http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.pdf
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY. (2022). *Buku Monografi 2021*.
- Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2012). *Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2012 ttg Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025*.
- Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). *Laporan Kerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta*. 0274, 1–79. www.visitingjogja.jogjapro.go.id
- Halpern, B. S. (2020). Building on a Decade of the Ocean Health Index. *One Earth*, 2(1), 30–33. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2019.12.011>

- Hasanah, N. (2022). Keberlanjutan pariwisata di pesisir selatan Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Daerah*, XXII(1), 4128–4145.
- Hilmi, E., Amron, & Christianto, D. (2022). The potential of high tidal flooding disaster in North Jakarta using mapping and mangrove relationship approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 989(1), 0–7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/989/1/012001>
- Ikejiaku, B.-V. (2009). The Concept 'Poverty' towards Understanding in the Context of Developing Countries 'Poverty qua Poverty': with Some Comparative Evidence on Britain. *Journal of Sustainable Development*, 2(2), 3–13. <https://doi.org/10.5539/jsd.v2n2p3>
- Irawati, N., & Rif'an, A. A. (2020). Penataan Ruang Kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Mitigasi Terhadap Bencana Kepesisiran. *Jurnal Penataan Ruang*, 15(2), 42. <https://doi.org/10.12962/j2716179x.v15i2.7268>
- Kedaulatan Rakyat. (2017). *Mungkinkah Pesisir Jadi Halaman Depan DIY*.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2021). *Pemerintah Targetkan Hapus Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir*. <https://m.kominfo.go.id/content/detail/38902/pemerintah-targetkan-hapus-kemiskinan-ekstrem-di-wilayah-pesisir/0/berita>
- Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. (2020). *Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)*.
- Luturmas, F. B., Maulita, & Rahmat. (2022). Konsep Blue Economy Di Daerah Pesisir Kalimantan Timur. *Jurnal Maritim*, 12(2), 52–59.
- Masjhoer, J. M. (2019). *Pengantar Wisata Bahari* (Issue April 2020). https://www.researchgate.net/publication/340883202_PENGANTAR_WISATA_BAHARI
- Nugraha, R. B. A., Syaharani, L., Iska, R., Mulyana, D., Wahyudin, Y., Purbani, D., Jayawiguna, H., Triyono, T., Setiawan, A., & Fajar, P. (2019). The impact of land used changes on mangrove forest and shoreline dynamic in Muara Gembong, Bekasi, West Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 241(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/241/1/012018>
- Patil, P. G., Virdin, J., Diez, S. M., Roberts, J., & Singh, A. (2016). Toward a blue economy: a promise for sustainable growth in the Caribbean. *An Overview. The World Bank*, 92. <http://documents.worldbank.org/curated/en/965641473449861013/pdf/AUS16344-REVISED-v1-BlueEconomy-FullReport-Oct3.pdf>
- Purwantara, S., Sugiharyanto, S., & Khotimah, N. (2014). Karakteristik Spasial Pengembangan Wilayah Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konteks UUK DIY. *Artikel Penelitian Hibah Bersaing*, 1–19. <https://core.ac.uk/download/pdf/33521436.pdf>
- Rogerson, C. M., & Rogerson, J. M. (2019). Emergent planning for South Africa's blue economy: Evidence from coastal and marine tourism. *Urbani Izziv*, 30, 24–36. <https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2019-30-supplement-002>
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Sudarsono, H., & Susantun, I. (2019). Pengembangan Potensi Wisata di Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. *Agriekonomika*, 8(1), 81. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v8i1.5011>

Potensi Penerapan Blue Economy Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Daerah istimewa Yogyakarta.pdf

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	www.dprd-diy.go.id Internet	102 words — 2%
2	kkp.go.id Internet	86 words — 2%
3	es.scribd.com Internet	85 words — 2%
4	peraturan.bpk.go.id Internet	83 words — 2%
5	kabarbangka.com Internet	81 words — 2%
6	id.123dok.com Internet	70 words — 1%
7	jdih.dprd-diy.go.id Internet	61 words — 1%
8	id.scribd.com Internet	53 words — 1%
9	maritim.go.id Internet	52 words — 1%

10	winrock.org Internet	47 words — 1 %
11	iptek.its.ac.id Internet	37 words — 1 %
12	docplayer.info Internet	35 words — 1 %
13	www.krjogja.com Internet	30 words — 1 %
14	ojs.unud.ac.id Internet	29 words — 1 %
15	oceanfdn.org Internet	26 words — 1 %
16	bappeda.jogjaprov.go.id Internet	22 words — < 1 %
17	www.detik.com Internet	22 words — < 1 %
18	www.slideshare.net Internet	21 words — < 1 %
19	www.researchgate.net Internet	20 words — < 1 %
20	e-journal.uajy.ac.id Internet	19 words — < 1 %
21	Feng-Hsiag Hsiao, Wei-Ling Chiang, Cheng-Wu Chen. "Fuzzy Control for Nonlinear Systems via Neural-Network-Based Approach", International Journal for	18 words — < 1 %

22 Teguh Purnomo, Abdi Seno, Muhammad Said Kartono Tony Suryo Utomo, Jaka Aminata. "Studi Pemanfaatan Sumber Daya Energi Terbarukan di Tempat Pelelangan Ikan Sebagai Pengembangan Usaha Koperasi Unit Desa dan Nilai Sosial Masyarakat", Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2022

18 words — < 1%

Crossref

23 money.kompas.com

Internet

18 words — < 1%

24 nanopdf.com

Internet

18 words — < 1%

25 azamalia.wordpress.com

Internet

16 words — < 1%

26 text-id.123dok.com

Internet

15 words — < 1%

27 zombiedoc.com

Internet

15 words — < 1%

28 digilib.uin-suka.ac.id

Internet

14 words — < 1%

29 docobook.com

Internet

14 words — < 1%

30 fr.scribd.com

Internet

14 words — < 1%

31 repository.unj.ac.id

Internet

13 words — < 1%

32 journal.laaroiba.ac.id
Internet

12 words — < 1%

33 Harry N Silalahi, Marhan Manaf, Alianto Alianto.
"Status Mutu Kualitas Air Laut Pantai Maruni
Kabupaten Manokwari", JURNAL SUMBERDAYA AKUATIK
INDOPASIFIK, 2017
Crossref

11 words — < 1%

34 digilib.unila.ac.id
Internet

11 words — < 1%

35 girimulyo.kulonprogokab.go.id
Internet

11 words — < 1%

36 keparakankel.jogjakota.go.id
Internet

11 words — < 1%

37 123dok.com
Internet

9 words — < 1%

38 dkp.babelprov.go.id
Internet

9 words — < 1%

39 documents1.worldbank.org
Internet

9 words — < 1%

40 ejournal.undip.ac.id
Internet

9 words — < 1%

41 kompaspedia.kompas.id
Internet

9 words — < 1%

42 surajis.wordpress.com
Internet

9 words — < 1%

43 Imam Lukito, Edward James Sinaga. "Analisa Pembentukan Organisasi Pengelola Nusakambangan sebagai Pilot Project Revitalisasi Pemasyarakatan", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021
Crossref

8 words — < 1%

44 Panfili, Giulia. "Wayang Kulit at the Time of Unesco", Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
ProQuest

8 words — < 1%

45 ojs.stiperkutim.ac.id
Internet

8 words — < 1%

46 www.allwalls.net
Internet

8 words — < 1%

47 www.neraca.co.id
Internet

8 words — < 1%

48 www.scribd.com
Internet

8 words — < 1%

49 www.sei.org
Internet

8 words — < 1%

50 "Disaster Risk Reduction in Indonesia", Springer Science and Business Media LLC, 2017
Crossref

7 words — < 1%

51 Abd Muis. "The Local Economic Development Based on Social Capital through Farmer Community", SIGn Journal of Social Science, 2022
Crossref

7 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF